



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0003.5.1.02.02.01.0026
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 126,000,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 126,000,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : APRIL

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				94,500,000.00
2	05 April 2024	00152	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	10,500,000.00	84,000,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	10,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	31,500,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	42,000,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
NIRMAN NUSMAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 40730425 200502 1 001

Makassar, 30 April 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
SI NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



Published: 04 April 2016

PT. Bank SIA SIAH Olongo Urban Housing

Dengan ini kami mohon bantuan saudara untuk meminjamkan uang kami untuk ditransfer dari :

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367
 Atas Nama : BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EMERAH
 Pada Tanggal : 04 April 2024

Kepada pihak ketiga kami dengan etichas sebagai berikut :

Nama/Rekening Bank	1	Rekening masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama	1	Nama penerima sesuai daftar terlampir
NPWP	1	
Unit	1	BELAKA JISA TERANG ADMINISTRASI KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENJUTAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BELAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024
Program	1	PROGRAM PENGURANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penjualan/Verifikasi Keuangan SKPD

NO.	KODE REKONSILIO	URAIAN	JUMLAH
1	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10,500,000.00
		Jumlah Pembelian	10,500,000.00

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
1	PPH 148.800.3109012000	PPH Pasal 21 (3%) - Non PMS	026754127798137	525.000,00
			Jumlah Pembayaran	525.000,00

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILLING	JUMLAH
			Jumlah Pajak	0.00
			Net yang dibayarkan	8,975,000.00

(Lampiran tambahan : Contoh dari buku pembelian kartu kredit bank yang akan digunakan)

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



STANLEY J. KRYGEL, Esq.

NIP : 1980330 201410 2 001

Y 00'000'000'01 Z 00'000'000'01 X 1000000000

[illegible]

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.01.2.02.0003.5.1.02.02.01.0026

Buku Kas No. : 00152

Tanggal : 05-04-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

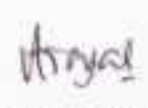
Banyaknya Uang : == SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

BENDAHARA PENGELUARAN


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

Jumlah Uang Rp. 10.500.000,-

MENGETAHUI

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK


YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS. MM
NIP. 19810610 201001 1 021

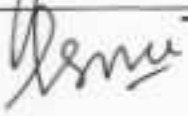
Makassar, 05-04-2024
Yang Menerima,



NO. DAFTAR: 00097/505000000020000/2024

**DAFTAR: BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI
KEUANGAN SKPD BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor / Tanggal SK : 070.04/024/KEP/II/2024 / 01 Februari 2024
 Kegiatan : 5.05.01.2.02 / Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0003 / Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 Rekening : 5.1.02.02.01.0026 / Belanja Jasa Tenaga Administrasi

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	RESKIYANTI SALAM, SE 66.854.932.4-804.000 Rekening : 1302010000507611	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	1 
2	KAMASIAH 66.308.951.4-804.000 Rekening : 1302010000507646	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	2 
3	FITRI ANGRAENI ALAMSYAH SAPUTRI 91.638.098.1-805.000 Rekening : 1302010000921973	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	3 
4	ISMAYUNDARI R. ISKAL 81.942.915.5-805.000 Rekening : 1302010000506828	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	4 
5	BURHANUDDIN BAGENDA, S.SOS.,M.Si 66.457.626.3-805.000 Rekening : 1302010000507557	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	5 

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
6	FAISAL 55.060.809.9-804.000 Rekening : 1302010000506810	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	6 
7	SRI WINARTY B. MANGAWEANG 66.553.641.3-804.000 Rekening : 1302010000507573	Jasa Administrasi - Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non ASN)	1.500.000	x 1		1.500.000				75.000	1.425.000	7 
	JUMLAH					10.500.000				325.000	9.975.000	

TERBILANG: SEPULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 05-04-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR SELAKU
PENGUNA ANGGARAN



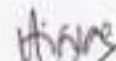
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SELAKU PPTK



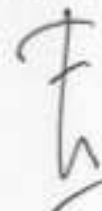
YUDISTHIRA AZHARI, S.SOS, MM
NIP. 19810610 201001 1 021

BENDAHARA PENGELUARAN



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR



FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 070.04/024/KEP/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang membantu melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tentang Penunjukan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);

17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

- KESATU : Menunjuk Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan tambahan penghasilan berupa honorarium bulanan yang berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Pemberian Honorarium Bulanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas dibayarkan setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 pada belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR,



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 070.04/024/KEP/II/2024

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	NAMA, NIP, GOLONGAN DAN JABATAN			
		PEMBANTU PPK (PNS)		PEMBANTU PPK (NON PNS)	
1	2	3		4	
1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nama : DJOHARSIH, S.STP, M.Si	Nama : RESKIYANTI SALAM, SE		
		NIP : 19800109 199912 2 001	NIP : -		
		Golongan : IV/a	Golongan : -		
		Jabatan : PEMBANTU PPK	Jabatan : PEMBANTU PPK		
		Nama : SURYANI USMAN, SE. M.Si	Nama : KAMASIAH		
		NIP : 19750327 200003 2 004	NIP : -		
		Golongan : IV/a	Golongan : -		
		Jabatan : PEMBANTU PPK	Jabatan : PEMBANTU PPK		
		Nama : ANDI SELFI, A.Md	Nama : FITRI ANGRAENI ALAMSYAH SAPUTRI		
		NIP : 19780406 201001 2 012	NIP : -		
		Golongan : III/b	Golongan : -		
		Jabatan : PEMBANTU PPK	Jabatan : PEMBANTU PPK		
			Nama : ISMAYUNDARI R., ISKAL		
			NIP : -		
			Golongan : -		
			Jabatan : PEMBANTU PPK		
			Nama : FAISAL		
			NIP : -		
			Golongan : -		
			Jabatan : PEMBANTU PPK		

NO	SKPD	NAMA, NIP, GOLONGAN DAN JABATAN	
		PEMBANTU PPK (PNS)	PEMBANTU PPK (NON PNS)
1	2	3	4
			Nama : BURHANUDDIN BAGENDA, S.Sos, M.Sos NIP : - Golongan : - Jabatan : PEMBANTU PPK Nama : SRI WINARTI B. MANGAWEANG., S.KEP. NIP : - Golongan : - Jabatan : PEMBANTU PPK

KEPALA DINIYAH KOTA
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KASSAN



NIRMAN KASSAN, MUNGKASA, S.T., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001